

EKONOMI PEMBANGUNAN

WIWIN PRIANA

BPUPNV jatim
Sep, 2023

Kata Pengantar

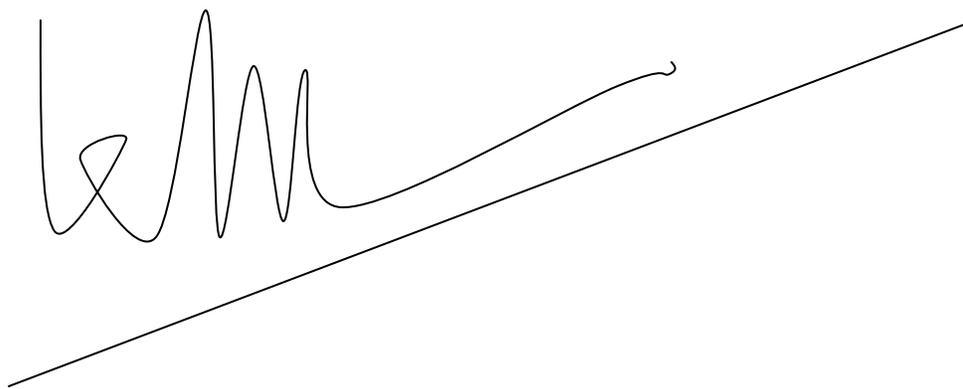
Dengan Mengucapkan Syukur kepada Allah SWT Kami telah Menyelesaikan, sebuah buku ajar Ekonomi Pembangunan karena kami sudah pernah mengajar Mata kuliah tersebut 8 tahun yang lalu maka baru kali ini tahun 2018 kami telah menyelesaikan pembuatan buku ini, kami juga banyak mengucapkan terimakasih kepada Prof Dr. Syamsul Huda MT yang merupakan penyedia bahan ajar Ekonomi Pembangunan dan kami meramunya menjadi buku ajar yang sederhana ini.

Buku ajar ini masih jauh dari baik karena buku ajar ini terlalu singkat dan to the point, tetapi mungkin dapat memudahkan mahasiswa untuk mempelajari Ekonomi Pembangunan ini, dan tak lupa kritik yang membangun demi perbaikan buku ini terimakasih sebelumnya

Demikian kata pengantar ini semoga buku ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa . Amiin, yaa robal alamin.

Surabaya September 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Daffatar isi

- Bab 1 : Pendahuluan 1
- Bab 2 : Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 5
- Bab 3 : Indikator Pembangunan moneter 8
- Bab 4 : Inikatrör Pembangunan non moneter 12
- Bab 5 : Teori pertumbuhan dan Pembangunan 15
- Bab 6 :Agen pertumbuhan ekonomi 25
- Bab 7 :Strategi pembangunan seimbang 29
- Bab 8 :Perencanaan Pembangunan Ekonomi 33
- Bab 9 :Perencanaan pembangunan di Indonesia 37
- Bab10:Sumber pembiayaan pembangunan 39
- Bab11:Masalah Pembangunan 42
- Bab12:Ketidak meratanya pembangunan di NSB 45
- Bab13:Faktor Penghambat Pembangunan 48
- Bab14:Pentingnya Pertumbuhan penduduk dalam pembangunan 50
- Bab15:Protret Pembangunan Ekonomi di Indonesia 55
- Bab16 Manfaat Pembangunan Ekonomi bagi masyarakat dan Negara 70
- Bab 17 Cina Menplak sebagai Negara Maju 80

Bab 1

Pendahuluan

Konsep-konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi dan Permasalahan Dasar yang Dihadapi Negara Sedang Berkembang Dra. Endang Mulyani, M.Pd. dalam kehidupan sehari-hari banyak orang berbicara masalah pembangunan. Kapan sebetulnya munculnya gagasan tentang pembangunan? Banyak orang mengatakan bahwa lahirnya Orde Baru merupakan awal pemicu munculnya gagasan pembangunan. Kata pembangunan selain menjadi semboyan juga dipakai sebagai nama pemerintahan Orde Baru. Hal itu bisa dilihat dari penamaan kabinet sejak pemerintahan Orde Baru yang selalu dikaitkan dengan kata “pembangunan”. Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, namun pembangunan sebetulnya memiliki perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi. Namun, istilah pembangunan sering dipersempit menjadi pembangunan ekonomi. Apakah sebenarnya arti pembangunan? Apa bedanya dengan pembangunan ekonomi, dan kapan pembangunan ekonomi mulai dibutuhkan? Modul ini merupakan modul pertama dari mata kuliah ekonomi pembangunan. Dalam modul ini Anda akan mempelajari beberapa konsep dasar dalam pembangunan ekonomi yang antara lain akan membahas beberapa pertanyaan di atas. Di samping itu, dalam modul ini juga akan dibahas tentang beberapa permasalahan dasar yang dihadapi negara sedang berkembang.

- Sebelum membahas apa itu ekonomi pembangunan dalam matakuliah ekonomi pembangunan maka mahasiswa harus mengetahui konsep dari Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan

ekonomi dua konsep tersebut berbeda tetapi saling berhubungan untuk jelasnya dapat dilihat uraian sebagai berikut ini :

KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN

EKONOMI PEMBANGUNAN

Suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi.

PEMBANGUNAN EKONOMI

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, atau

Suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang

Pembangunan ekonomi

adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari **pertumbuhan ekonomi** (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan **pendapatan nasional** ^[1]. Suatu negara dikatakan mengalami

pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan **produk nasional bruto** (PNB, GNP) riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam **lembaga, pengetahuan, sosial** dan **teknik**.

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

- Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

- Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk

berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

- Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

PERHATIAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Sebelum PD II para ilmuwan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi, karena faktor-faktor sbb :

1. Masih banyak negara sebagai negara jajahan
2. Kurang adanya usaha dari tokoh masyarakat untuk membahas pembangunan ekonomi. Lebih mementingkan usaha meraih kemerdekaan dari penjajah.

3. Para pakar ekonomi lebih banyak menganalisis kegagalan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran (depresi berat)

Pasca PD II, banyak negara memperoleh kemerdekaan (al : India, Pakistan, Phillipina, Korea & Indonesia), perhatian terhadap pembangunan ekonomi mulai berkembang disebabkan oleh :

1. Negara jajahan yang memperoleh kemerdekaan
2. Berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi.
3. Adanya keinginan dari negara maju untuk membantu negara berkembang dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

PENGGOLONGAN NEGARA

1. Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat :

a. Negara Dunia I (**Negara Maju**)

Eropa Barat (Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, Jerman Barat)

Amerika Utara (USA, Kanada)

Australia, New Zeland dan Jepang

b. Negara Dunia II (**Negara Maju**)

Eropa Timur (Rusia, Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia)

c. Negara Dunia III (**Negara Sedang Berkembang/Negara Selatan**)

Sebagian besar Asia (kecuali Jepang), Afrika, Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan).

2. Berdasarkan pada tingkat pendapatan perkapita

- a. Negara Maju $\bar{O} > \text{US\$ } 2.000$
- b. Negara Semi Maju $\bar{O} > \text{US\$ } 400$
- c. Negara Miskin $\bar{O} \leq \text{US\$ } 400$

Analisis Ekonomi Pembangunan = Permasalahan Negara Sedang Berkembang.

Tujuan analisis ekonomi pembangunan :

1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan.
2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan.
3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan.

Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan

1. Masalah pembentukan modal (investasi)
2. Masalah perdagangan luar negeri (ekspor & impor)
3. Masalah pengerahan tabungan.
4. Masalah bantuan luar negeri
5. Masalah dalam sektor pertanian atau industri
6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam menciptakan pembangunan.

Bab 2

PEMBANGUNAN EKONOMI & PERTUMBUHAN EKONOMI

PEMBANGUNAN EKONOMI

- PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT
PERTAMBAHAN GDP > TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK
- PENINGKATAN GDP DIBARENGI DENGAN PEROMBAKAN STRUKTUR EKONOMI TRADISIONAL KE MODERNISASI
PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI NYSB.

PERTUMBUHAN EKONOMI

- KENAIKAN GDP TANPA MEMANDANG TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI EKONOMI.
- PERTUMBUHAN EKONOMI MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA MAJU.

SEBAB-SEBAB PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI :

1. KEINGINAN NEGARA UNTUK MENGEJAR KETINGGALAN
2. PERTUMBUHAN PENDUDUK
3. ADANYA KEHARUSAN NEGARA MAJU UNTUK MEMBANTU NYSB
4. ADANYA PERIKEMANUSIAAN THD NYSB

METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

1. METODE PRODUKSI
2. METODE PENDAPATAN

3. METODE PENGELUARAN

11 SEKTOR PRODUKTIF PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL :

1. PERTANIAN
2. INDUSTRI PENGOLAHAN
3. PERTAMBANGAN DAN GALIAN
4. LISTRIK
5. AIR DAN GAS
6. BANGUNAN
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
8. PERDAGANGAN
9. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
10. SEWA RUMAH
11. PERTAHANAN
12. JASA LAINNYA

CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

1. PENDAPATAN NASIONAL HARGA BERLAKU (NOMINAL)
2. PENDAPATAN NASIONAL HARGA TETAP (RIIL)

BAB 3

INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER DAN NON MONETER

PENDAPATAN PERKAPITA PERTAHUN PERLU DIKETAHUI UNTUK :

1. MEMBANDINGKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI MASA KE MASA

2. MEMBANDINGKAN LAJU PERKEMBANGAN EKONOMI ANTARA BERBAGAI NEGARA
3. MELIHAT BERHASIL TIDAKNYA PEMBANGUNAN EKONOMI SUATU NEGARA.

TINGKAT PENDAPATAN PERKAPITA TIDAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TINGKAT PEMBANGUNAN SUATU NEGARA, KARENA :

1. KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER DARI KETIDAKSEMPURNAAN DALAM MENGHITUNG PENDAPATAN NASIONAL DAN PENDAPATAN PERKAPITA.
2. KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER DARI KENYATAAN BAHWA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BUKAN SAJA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENDAPATAN MEREKA TETAPI JUGA OLEH FAKTOR-FAKTOR LAIN.

KELEMAHAN AD 1.

- KELEMAHAN METODOLOGIS & STATISTIS DALAM MENGHITUNG PENDAPATAN PERKAPITA DALAM NILAI MATA UANG SENDIRI MAUPUN MATA UANG ASING.
- TERJADI PENAFSIRAN YANG SALAH / TERLALU RENDAH THD NEGARA MISKIN KARENA JENIS-JENIS KEGIATAN DI NEGARA MISKIN TERDIRI DARI UNIT-UNIT KECIL DAN TERSEBAR DI BERBAGAI PELOSOK SHG TIDAK DIMASUKKAN DALAM VARIABEL PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL.
- NILAI TUKAR RESMI MATA UANG SUATU NEGARA DENGAN VALUTA ASING TIDAK MENCERMINKAN PERBANDINGAN HARGA KEDUA NEGARA, WALAUPUN DALAM TEORI DIKATAKAN NILAI TUKAR INI MENYATAKAN HARGA.

KELEMAHAN AD 2

FAKTOR-FAKTOR LAIN MENENTUKAN PENDAPATAN DARI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU NEGARA

1. FAKTOR EKONOMI :

- STRUKTUR UMUR PENDUDUK
- DISTRIBUSI PENDAPATAN TIDAK MERATA, SEBAGIAN TIDAK MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN.
- CORAK PENGELUARAN MASYARAKAT BERBEDA
- MASA LAPANG / WAKTU SENGGANG TINGGI
- PEMBANGUNAN EKONOMI TDK HANYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT TETAPI JUGA HARUS MENGURANGI JUMAH PENGANGGURAN.

2. FAKTOR NON EKONOMI :

- PENGARUH ADAT ISTIADAT
- KEADAAN IKLIM DAN ALAM SEKITAR
- KETIDAKBEBASAN BERTINDAK DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DAN BERTINDAK

Bab 4

INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER

1. Pendapatan Perkapita

2. Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih (Net Economic Welfare)

Diperkenalkan William Nordhaus dan James Tobin (1972), menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indikator ekonomi yg lebih baik, dgn dua cara :

- a. **Koreksi Positif** : Memperhatikan waktu senggang (leisure time) dan perekonomian sector informal.
- b. **Koreksi Negatif** : Kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan

INDIKATOR PEMBANGUNAN NON MONETER

1. Indikator Sosial

Oleh Backerman ; dibedakan 3 kelompok :

1. Usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masy. di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional, dipelopori oleh Collin Clark dan Golbert dan Kravis.
2. Penyesuaian pendapatan masy. dibandingkan dengan mempertimbangkan tingkat harga berbagai negara.
3. Usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan data yg tdk bersifat moneter (non monetary indicators).

Indikator non moneter yg disederhanakan (modified non-monetary indicators).

2. Indeks Kualitas Hidup dan Pembangunan Manusia

Morris D : Physical Quality of Life Index (PQLI) Indeks Kualitas Hidup (IKH) yaitu gabungan tiga faktor : **tingkat harapan hidup, angka kematian dan tingkat melek huruf**. Sejak thn 1990 UNDP

mengembangkan indeks pembangunan manusia (**Human Development Index = HDI**) : (1) Tingkat harapan hidup (2) Tingkat melek huruf masyarakat dan (3) Tingkat pendapatan riil perkapita masy. berd. Daya beli masing-masing negara. Besarnya indeks 0 s/d 1. Semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunannya tinggi demikian sebaliknya.

3. Indikator Campuran

BPS : Indikator Kesejahteraan Rakyat Susenas Inti (Core Susenas)
Pendidikan : tk pendidikan, tk melek huruf & tk partisipasi pendidikan

1. Kesehatan : rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan
2. Perumahan : sumber air bersih & listrik, sanitasi & mutu rumah
3. Angkatan kerja : partisipasi tenaga kerja, jml jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerjaan
4. Keluarga Berencana dan Fertilisasi : Penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi
5. Ekonomi : tingkat konsumsi perkapita
6. Kriminalitas : jml pencurian pertahun, jumlah pembunuhan pertahun, jumlah perkosaan pertahun.
7. Perjalanan wisata : frekuensi perjalanan wisata pertahun
8. Akses di media massa : jumlah surat kabar, jumlah radio dan jumlah televisi

BAB 5

TEORI PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN EKONOMI

1. MAZHAB HISTORISME

Pola pendekatan pemb.ekonomi yg berpangkal pd perspektif sejarah
Bersifat induktif empiris.

Fenomena ekonomi : Perk. Menyeluruh & tahap tertentu dlm sejarah.

Dimulai di Jerman abad XIX s/d awal abad XX.

FRIEDRICH LIST (TH.1840)

Pelopop Historismus : Eksponen Nasionalisme Ekonomi

Bhw Tahap Perkemb. Ekonomi yaitu dgn cara produksi :

1. Tahap primitip
2. Tahap Beternak
3. Tahap Pertanian
4. Industri Pengolahan (Manufacturing)
5. Pertanian, Industri Pengolahan & Perdagangan

BRUNO HILDEBRAND (1848)

Terjadi Evolusi dalam masyarakat

Kritik thd List : Bhw Pemb. Ek.bkn dr cara produksi / cara konsumsi.

Tetapi cara distribusi, yaitu :

1. Perekonomian Barter (Natura)
2. Perekonomian Uang
3. Perekonomian Kredit

Kelemahan Teori Bruno :

1. Tdk jelas proses perkembangan dr tahap tertentu ke tahap berikutnya
2. Tdk memberi sumbangan yang berarti thd perlatan analitis di bidang ilmu ekonomi.

KARL BUCHER

Sintesa Pendapat List dan Bruno

Perkemb.Ek. Ada 3 tahap :

1. Produksi utk keb. Sendiri (subsistence)
2. Perekon. Kota dimana pertukaran sudah meluas
3. Perekon. Nas. Dimana peran pedagang menjadi semakin penting

WALT WHITMAN ROSTOW (WW. ROSTOW)

Sangat populer dan paling banyak komentar dari ahli

Artikel : Economics Journal (Maret 1956) dimuat dlm Buku The Stages of Economics Growth (1960).

Menurut WW Rostow, Pemb. Ekonomi mrpk suatu proses yg dpt menyebabkan :

1. Perubahan orientasi ekonomi, politik dan social yg pd mulanya berorientasi kpd suatu daerah menjadi berorientasi keluar.
2. Perubahan pandangan masy. mengenai jumlah anak dlm keluarga yaitu kesadaran utk membina keluarga kecil
3. Perubahan dlm kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yg tdk produktif menjadi investasi yg produktif

4. Perubahan sikap hidup dari adat istiadat yg kurang merangsang pemb. Ekonomi missal kurang menghargai waktu kerja dan orang lain

WW Rostow membedakan pembangunan ekonomi ke dalam 5 tahap :

1. Tahap Masyarakat Tradisional (The Traditional Society)

- Fungsi Produksi terbatas, cara produksi masih primitif
- Tingkat produktifitas masy. rendah : utk sector pertanian
- Struktur social hirarkis : mobilitas vertical masy. kecil ; kedudukan masy tidak berbeda dengan nenek moyang.
- Kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah.

2. Tahap Prasyarat Tinggal Landas (The Preconditions for Take-Off)

Masa transisi masy.mempersiapkan untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (self sustained growth).

Tahap ini memiliki 2 corak berbeda :

- a. Tahap Prasyarat Tinggal landas yg dialami negara Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika : perombakan thd masy. tradisional yg sudah ada untuk mencapai tahap tsb.
- b. Tahap Prasyarat Tinggal landas yg dialami negara **born free** (daerah imigran) (Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru) : tanpa harus merubah sistim masy. tradisional yg sudah ada.

3. Tahap Tinggal Landas (The Take-Off)

Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi, Kemajuan pesat dalam inovasi atau terbukanya pasar-pasar baru.

3 ciri utama negara yg mencapai Tahap Tinggal Landas :

1. Kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari PNB (Nett National Product).
2. Berkembangnya satu atau beberapa sector industri pemimpin (leading sector) dgn tingkat pertumbuhan tinggi
3. Tercapainya suatu kerangka dasar politik, social dan kelembagaan yg bisa menciptakan perkembangan sector modern dan eksternalitas ekonomi yg menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

4 faktor untuk menciptakan leading sector :

1. Harus ada kemungkinan perluasan pasar bagi barang-barang yg diproduksi yg mempunyai kemungkinan utk berkembang dgn cepat
2. Dalam sector tsb hrs dikembangkan teknik produksi yg modern dan kapasitas produksi harus bisa diperluas
3. Harus tercipta tabungan dalam masyarakat dan para pengusaha harus menanamkan kembali keuntungannya untuk membiayai pembangunan sector pemimpin
4. Pembangunan dan transformasi teknologi sector pemimpin harus bisa diciptakan kebutuhan akan adanya perluasan kapasitas dan modernisasi sector-sektor lain.

Urutan Negara Lepas Landas & Leading Sector (WW Rostow)

(Masa Tinggal Landas : 20 – 25 tahun) :

No Urut	Negara	Tahun	Leading Sector
1	Inggris	1783-1802	Industri Tekstil
2	Perancis	1830-1860	Jaringan KA
3	Belgia	1833-1860	Jaringan KA
4	USA	1843-1860	Jaringan Jalan KA
5	Jerman	1850-1873	Jaringan Jalan KA
6	Swedia	1868-1890	Industri Kayu
7	Jepang	1878-1900	Industri Sutera
8	Rusia	1890-1914	Jaringan Jalan KA
9	Kanada	1896-1914	Jaringan Jalan KA
10	Argentina	1935	Industri Subst Impor
11	Turki	1937	
12	India	1952	
13	RRC	1952	

4. Tahap Menuju Kedewasaan (The Drive to Maturity)

Kondisi masy.sudah secara efektif mengg. Teknologi modern di hampir semua kegiatan produksi dan kekayaan alam. Sektor pemimpin baru akan bermunculan menggantikan sector pemimpin yang mengalami kemunduran.

Karakteristik non ekonomi pada tahap menuju kedewasaan :

1. Struktur dan keahlian tenaga kerja berubah

Kepandaian dan keahlian pekerja bertambah tinggi.

Sektor industri bertambah penting peranannya

Sektor pertanian menurun peranannya.

2. Sifat kepemimpinan dalam perush. mengalami perubahan. Peranan manajer professional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik.
3. Masy. bosan dgn keajaiban yg diciptakan industrialisasi shg timbul kritik-kritik.

Negara yg mencapai tahap ini (WW Rostow) : Inggris (1850), USA (1900), Jerman dan Perancis (1910), Swedia (1930) Jepang (1940) Rusia dan Kanada (1950).

5. Tahap Konsumsi Tinggi (The Age of High Mass Consumption)

Perhatian masy. menekankan pd masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan masalah produksi.

3 macam tujuan masy. yg ingin dicapai pada tahap ini :

1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan berakibat penjajahan thd bangsa lain
2. Menciptakan negara kesejahteraan (**welfare state**) (**Negara Persemakmuran = Common Wealth**) dgn cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yg telah merata melalui sistim pajak progresif (semakin banyak semakin besa)
3. Meningkatnya konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) menjadi konsumsi thd barang tahan lama dan barang-barang mewah.

Negara pertama mencapai tahap ini : USA (th. 1920), Inggris (th. 1930), Jepang dan Eropa Barat (th. 1950) Rusia (Pasca Stalin)

TEORI SCHUMPETER

- **SISTIM KAPITALISME** Õ **SISTIM YANG PALING BAIK** MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
- **NAMUN DALAM JANGKA PANJANG** SISTIM KAPITALISME AKAN MENGALAMI **STAGNASI**.

FAKTOR UTAMA PENYEBAB PERKEMBANGAN EKONOMI : Proses inovasi oleh Inovator atau Wiraswasta (**ENTREPREUNER**).

INOVASI MEMPUNYAI 3 PENGARUH :

1. Diperkenalkan teknologi baru
2. Keuntungan lebih (monopolistis), sumber dana akumulasi modal.
3. Timbul proses peniruan (imitasi); meniru teknologi.

FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG INOVASI :

Schumpeter Õ **Ada 5 kegiatan dalam inovasi :**

1. Diperkenalkan produk baru yang sebelumnya tidak ada.
2. Diperkenalkannya cara produksi baru
3. Pembukaan daerah pasar baru
4. Penemuan sumber bahan mentah baru
5. Perubahan organisasi industri Õ **EFISIENSI INDUSTRI**

SYARAT-SYARAT TERJADINYA INOVASI :

- Ada calon pelaku inovasi (inovator dan wiraswasta) dlm masyarakat
- Ada lingkungan sosial, politik & teknologi untuk merangsang semangat inovasi & pelaksanaan ide-ide untuk berinovasi.

Ada 2 faktor penunjang lain, yaitu :

1. Tersedia cadangan ide-ide baru secara memadai
2. Ada sistim perkreditan Õ menyediakan dana entrepreneur untuk merealisasikan ide tersebut menjadi kenyataan.

TEORI KETERGANTUNGAN

- Tergabungnya secara paksa (**FORCED INCORPORATED**) daerah-daerah pinggiran ke dalam ekonomi kapitalisme dunia ; penyebab keterbelakangan (**UNDERDEVELOPED**) NYSB.
- **IMPLIKASI** Õ Tanpa kolonialisme dan integrasi ke sistim kapitalisme dunia, NYSB mampu mencapai tingkat kesejahteraan tinggi dan dapat mengembangkan pengolahan (**MANUFACTURING**) mereka atas usaha dan kekuatan sendiri.
- Mengabaikan faktor-faktor intern ; struktur sosial budaya & pola perilaku masyarakat prakolonial.
- Terlalu melebihkan **EFISIENSI ADMINISTRATIF** untuk menekankan kemungkinan yang sebenarnya terbuka bagi negara-negara untuk mengalami suatu transisi **KAPITALISME BORJUIS**.

STRATEGI PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN EKONOMI

STRATEGI UPAYA MINIMUM KRITIS (CRITICAL MINIMUM EFFORT)

- Menaikkan pendapatan perkapita pd tingkat pembangunan berkesinambungan (**SUSTAINABLE**) Õ terjadi HARVEY LEIBSTEIN.
- Setiap ekonomi tergantung **HAMBATAN & RANGSANGAN**.

Hambatan Õ menurunkan pendapatan perkapita dari tingkat sebelumnya

Rangsangan \tilde{O} menaikkan pendapatan perkapita

PERTUMBUHAN PENDUDUK FUNGSI DARI PENDAPATAN PERKAPITA

- Pendapatan naik, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Hanya pada titik tertentu, jika melampaui titik tsb, kenaikan pendapatan perkapita menurunkan tingkat kesuburan. Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju pertumbuhan penduduk turun (**LEIBSTEIN**).
- Dengan kenaikan pendapatan perkapita, keinginan memperoleh anak semakin berkurang. Spesialisasi meningkat dan Mobilitas ekonomi & sosial ; kenyataan mengurus anak sangat sulit dan mahal. Maka laju pertumbuhan penduduk **KONSTAN** dan menurun (**TESIS KAPILARITAS SOSIAL DUMONT**).

Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan pendapatan perkapita dari pelaksanaan Upaya Minimum Kritis :

1. Skala disekonomis internal ; akibat tidak dapat dibaginya faktor produksi.
2. Skala disekonomis external ; akibat ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan kelembagaan di negara berkembang.

Bab 6

AGEN PERTUMBUHAN

1. Pengusaha
2. Investor
3. Penabung
4. Inovator

Kegiatan tersebut membantu pertumbuhan sehingga memunculkan :

1. Kewiraswastaan
2. Peningkatan sumber pengetahuan
3. Pengembangan keterampilan produktif masyarakat
4. Peningkatan laju tabungan dan investasi

RANGSANGAN PERTUMBUHAN

1. Rangsangan ZERO-SUM

Tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi bersifat upaya distributif

- Kegiatan bukan dagang ; posisi monopolistik, kekuatan politik & prestise sosial
- Kegiatan dagang , tidak menambah sumber agregat
- Kegiatan spekulatif, memboroskan sumber kewiraswastaan yang langka
- Kegiatan tabungan netto ; nilai sosial nihil / lebih rendah dari privatnya.

2. Rangsangan POSITIVE-SUM

Menuju pada pengembangan pendapatan nasional

Dalam ekonomi terbelakang, ada pengaruh bersifat anti perubahan yang menekan pendapatan perkapita :

1. Kegiatan usaha ZERO-SUM, pembatasan peluang ekonomi
2. Tindakan konservatif para buruh yg terorganisir menentang perubahan
3. Perlawanan thd gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengetahuan
4. Kenaikan pengeluaran konsumsi mewah pribadi / publik ; tidak produktif
5. Pertumbuhan penduduk & Angkatan buruh.

Upaya minimum kritis mengatasi pengaruh perekonomian terbelakang agar laju pertumbuhan ekonomi merangsang POSITIVE-SUM menjadi lebih besar dari ZERO-SUM, shg pendapatan perkapita naik, tabungan & investasi naik, yaitu :

1. Ekspansi agen pertumbuhan
2. Sumbangan masy. thd. per unit modal naik seiring rasio modal output turun.
3. Berkurangnya keefektifan faktor-faktor penghambat pertumbuhan
4. Penciptaan kondisi lingkungan dan sosial ; mobilitas ekonomi dan sosial naik.
5. Peningkatan spesialisasi dan perkembangan sektor sekunder dan tersier.

Bab 7

STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG

Para ekonom Teori Dorongan Besar-Besaran (BIG PUSH THEORY)

Yaitu pembangunan di berbagai jenis industri secara bersamaan (SIMULTANEOUS) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar. **Diperlukan keseimbangan antara DEMAND & SUPPLY.**

TUJUAN UTAMA : menciptakan jenis industri yg berkaitan erat satu dgn yg lain shg setiap industri memperoleh EKSTERNALITAS EKONOMI sbg akibat INDUSTRIALISASI.

Menurut REINSTEIN-RODAN, pembangunan industri besar-besaran menciptakan 3 macam eksternalitas ekonomi, yaitu :

1. Yang diakibatkan oleh perluasan pasar
2. Karena industri yang sama letaknya berdekatan
3. Karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.

SCITOVSKY ï Eksternalitas : jasa-jasa yg diperoleh dgn cuma-cuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri.

STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG

ALBERT O. HIRSCHMAN dan **PAUL STREETEN** ï pola yang lebih cocok untuk mempercepat pembangunan di NYSB, karena :

1. Secara historis pemb. ekonomi coraknya tidak seimbang
2. Mempertinggi efesiensi penggunaan Sumber daya tersedia
3. Pembangunan tak seimbang menimbulkan KEMACETAN (BETTLENECKS) yaitu gangguan dlm proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong pembangunan selanjutnya.

Pembangunan tak seimbang antara sektor prasarana & sektor produktif

Cara pengalokasian sumber daya ada 2 bagian :

1. Cara pilihan pengganti (SUBSTITUTION CHOICES)

Menentukan proyek yang harus dilaksanakan

2. Cara pilihan penundaan (POSTPONEMENT CHOICES)

Menentukan urutan proyek yang harus didahulukan pelaksanaannya.

HIRSCHMAN menganalisis alokasi sumber daya sektor prasarana (Social Overhead Capital = SOC) dgn sektor produktif yg menghasilkan brg kebutuhan masy. (Directly Productive Activities = DPA). **Ada 3 pendekatan :**

1. Pemb. yg seimbang antar kedua sektor

2. Pemb. tidak seimbang dimana sektor prasarana lebih ditekankan.

3. Pemb. tidak seimbang dimana sektor produktif lebih ditekankan

Kegiatan ekonomi mencapai efisien & optimal, jika :

1. Sumber daya dialokasikan DPA & SOC, pd tingkat produksi maksimum

2. Pd tingkat produksi tertentu, jumlah sumber daya digunakan DPA sedangkan SOC jumlahnya menurun.

PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG DALAM SEKTOR PRODUKTIF

Mekanisme pendorong pembangunan (INDUCEMENT MECHANISM) ada 2 :

1. Pengaruh keterkaitan ke belakang (Backward Linkage Effects)

Tingkat rangsangan yg diciptakan pembangunan industri thd perkembangan industri yg menyediakan input bagi industri tsb.

2. Pengaruh keterkaitan ke depan (Forward Linkage Effects)

Rangsangan yg diciptakan oleh pembangunan industri thd perkembangan industri yg menggunakan produk industri yg pertama sbg input mereka.

Berdasarkan pada tingkat keterkaitan antar industri, ada 2 golongan :

1. Industri SATELIT (SATELITY INDUSTRY)

- Lokasi berdekatan dgn industri induk mempertinggi efisiensi
- Input utama berasal dari produk industri induk
- Besarnya industri tidak melebihi industri induk.

2. Industri NON SATELIT (NON SATELITY INDUSTRY)

CHENERY & WATANABE * Penggolongan industri ada 4 golongan :

1. Industri barang setengah jadi
2. Industri barang jadi
3. Industri barang setengah jadi sektor primer
4. Industri barang jadi sektor primer.

Bab 8

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

CONYERS & HILLS (1994) ; Suatu proses yg bersinambung & mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi diatas tdp 4 elemen perencanaan.

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4. Perencanaan untuk masa depan

ARTHUR LEWIS (1966) dlm buku “**DEVELOPMENT PLANNING**”, membagi perencanaan dlm 6 pengertian :

1. Berarti faktor letak geografis, bangunan, tempat tinggal, bioskop, dll.

DI NYSB é Perencanaan kota& negara (**Town & Country Planning**)

Perencanaan tata guna tanah (**Land-use Planning**)

Perencanaan fisik (**Physical Planning**)

Perencanaan kota& daerah (**Urban & Regional Planning**)

2. Berarti keputusan penggunaan dana pemerintah di masa datang
3. Berarti ekonomi berencana
4. Perencanaan kadangkala setiap penentuan sasaran produksi pemerintah

5. Penetapan sasaran perekonomian secara keseluruhan
6. Perencanaan kadangkala untuk menggambarkan sarana pemerintah

Ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi :

- Usaha mencapai perkembangan sosial ekonomi mantap (**Steady social economic growth**). Tercermin pada pertumbuhan ekonomi positif.
- Usaha meningkatkan pendapatan
- Usaha perubahan struktur ekonomi ; Usaha diversifikasi ekonomi
- Usaha perluasan kesempatan kerja
- Usaha pemerataan pembangunan ; **DISTRIBUTIVE JUSTICE**
- Usaha pembinaan lembaga ekonomi masy.
- Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi

FUNGSI PERENCANAAN :

1. Tdp pengarahan kegiatan, pedoman kegiatan kpd pencapaian tujuan pemb.
2. Tdp perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan & risiko masa y.a.d.
3. Memberi kesempatan mengadakan pilihan terbaik
4. Dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan
5. Sbg alat mengukur / standar thd pengawasan evaluasi.

Dari sudut pandang ekonomi, perlunya perencanaan adalah :

1. Agar penggunaan sumber pembangunan terbatas dapat efisien dan efektif, shg terhindar dari pemborosan.

2. Agar perkembangan / pertumbuhan ekonomi menjadi mantap
3. Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur.

Syarat-syarat keberhasilan perencanaan :

1. Komisi perencanaan ; terorganisir dan ahli.
2. Data statistik
3. Tujuan
4. Penetapan sasaran & prioritas ; secara makro dan sektoral
5. Mobilisasi sumber daya ; luar negeri & dalam negeri (Saving, Laba & Pajak)
6. Kesenambungan perencanaan.
7. Sistem administrasi yang efisien ; kuat, tidak korup (Lewis)
8. Kebijaksanaan pembangunan yg tepat
9. Administrasi yg ekonomis
10. Dasar pendidikan.
11. Teori konsumsi; menurut GALBRAITH (1962)
12. Dukungan masyarakat; rencana nasional

Bab 9

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa ORDE LAMA :

è **Th. 1947 : PLAN PRODUKSI TIGA TAHUN RI** yaitu : Th. 1948, 1949 & 1950

Bidang-bidang : Pertanian, peternakan, perindustrian & kehutanan

è **Th. 1952** : Usaha perencanaan lebih menyeluruh, tetap SEKTOR PUBLIK

è **Th. 1956 - 1960 : REPELITA**

Th. 1961 - 1969 : **RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA**

Jangka waktu 8 tahun terbagi atas 3 tahun & 5 tahun.

Program STABILISASI & REHABILITASI EKONOMI PEMBANGUNAN sejak ORDE BARU, berpangkal pada NATION BUILDING, meliputi :

1. **JANGKA PANJANG** : Pendekatan pembangunan utuh dan terpadu (**UNIFIED & INTERGRATIF**) antar aspek kehidupan masyarakat
2. **JANGKA MENENGAH** : Pembangunan sektor pertanian dan pengembagnan sektor sosial menuju kesejahteraan & keadilan sosial.

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM PEMBANGUNAN :

1. Mengurangi jumlah tabungan yg diciptakan anggota masyarakat
2. Corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan & sarana sosial

3. Pemerataan pendapatan terjadi jurag antara golongan masyarakat
4. Strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan
5. Mempercepat kenaikan produksi barang makanan
6. Perkembangan ekspor impor, ekspor impor

Bab 10

SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1. Tabungan Dalam Negeri

Sumber : Tabungan perusahaan & Tabungan rumah tangga

Tabunga Luar Negeri

Sumber : Tabungan pemerintah asing (LN) dan tabungan swasta asing

2. Investasi dan Pertumbuhan

3. Efisiensi penggunaan modal

4. Sumber dana dari luar negeri : pemerintah / swasta

5. Bantuan luar negeri

Lembaga-Lembaga Bantuan Internasional

1. The Asian Development Bank (ADB)

2. Bank Dunia (World Bank) : IMF Badan Perwakilan Bank Dunia.

DAMPAK BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP PEMBANGUNAN

Pendekatan Two Gap Model : Bantuan & tabungan luar negeri penyumbang terbesar untuk investasi atau memperbesar impor (memperoleh devisa).

- Kenyataan bahwa tingkat pertumbuhan negara penerima bantuan tidak begitu tinggi. (Pendekatan Harod Domar kurang tepat).
- NYSB mengalami kekurangan input komplemen ; kecakapan tenaga kerja, kapasitas administratif, infrastruktur, institusi ekonomi & stabilitas politik. Tingkat tabungan tinggi tidak mampu mendorong pertumbuhan.
- Bantuan luar negeri tidak dapat menyumbang kenaikan tabungan / impor.
- Bantuan luar negeri tidak menambah tabungan domestik, shg menaikkan konsumsi & impor dan menurunkan investasi & ekspor.

Menurut teori ekonomi bantuan menaikkan konsumsi & investasi.

MANFAAT INVESTASI ASING

1. Menciptakan perluasan kerja
2. Proses alih teknologi & keterampilan yg bermanfaat, **Know How**
3. Sbg sumber tabungan / devisa

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN NYSB THD INVESTASI ASING

Menggunakan Kebijakan **Restriktif** :

1. Prasyarat kinerja
2. Hukum Kejenuhan (Saturation)

3. Pengendalian Repatriasi Laba

Menggunakan Kebijakan **Insentif** (Rangsangan) adalah pajak.

PINJAMAN KOMERSIAL

Sumber dana luar negeri yang sangat cepat perkembangannya adalah pinjaman swasta, berasal dari 3 sumber :

1. **BOND LENDING**

Bentuk investasi portofolio, pembelian saham perusahaan-perusahaan NSB oleh pihak asing

2. **PINJAMAN KOMERSIAL**

Dari bank-bank luar negeri, pasar EURO CURRENCY.

3. **KREDIT EKSPOR**

Bab 11

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Konsep dasar teori pertumbuhan ekonomi dengan kerangka analisis kemungkinan produksi sederhana (**SIMPLE PRODUCTION POSSIBILITY**) : untuk melihat tingkat, komposisi dan pertumbuhan output nasional.

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Akumulasi modal
2. Pertumbuhan penduduk
3. Kemajuan teknologi

Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi :

- Netral
- Hemat tenaga kerja (Labor Saving)
- Hemat modal (Capital Saving)

KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN EKONOMI MODERN

SIMON KUZNETS (Nobel Ekonomi 1971)

mendefinisikan **PERTUMBUHAN EKONOMI** : peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya ; pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Definisi tersebut ada 3 komponen pokok yang penting, yaitu :

1. Kenaikan output nasional secara terus menerus

2. Kemajuan teknologi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi
3. Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi.

KUZNETS memisahkan 6 karakteristik proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju :

DUA VARIABEL EKONOMI AGREGATIF

1. Tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk
2. Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja.

DUA VARIABEL TRANSFORMASI STRUKTURAL

3. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi
4. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi

DUA FAKTOR yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional :

5. Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku.
6. Pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia.

Bab 12

KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN NYSB

Menurut IRMA ADELMAN & CYNTHIA TAFT MORRIS (1973) ada 8 :

1. Peningkatan penduduk tinggi, sehingga pendapatan perkapita menurun
2. Inflasi : dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan peningkatan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek padat modal (**Capital Intensive**) sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (**Term of Trade**) bagi NYSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor NYSB.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan, industri rumah tangga dll.

KEMISKINAN

Ukuran kemiskinan :

1. Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1997)

2. Kemiskinan Relatif

Bersifat dinamis, shg kemiskinan akan selalu ada.

INDIKATOR KEMISKINAN

1. Tingkat konsumsi beras
2. Tingkat pendapatan
3. Indikator kesejahteraan rakyat

Publikasi UN (1961) berjudul **“INTERNATIONAL DEFINITION AND MEASUREMNT OF LEVELS OF LIVING : AN INTERIM GUIDE”** Ada **9 Komponen kesejahteraan :**

1. Kesehatan
2. Konsumsi makanan & gizi
3. Pendidikan
4. Kesempatan Kerja
5. Perumahan

6. Jaminan sosial
7. Sandang
8. Rekreasi
9. Kebebasan

STRATEGI KEBIJAKAN MENGURANGI KEMISKINAN

1. Pembangunan pertanian
2. Pembangunan SDM
3. Peranan LSM

Bentuk & macam organisasi kemasyarakatan ada 4 katagori :

1. LSM
2. LPSM
3. Organisasi Sosial lain
4. Organisasi Semi Pemerintah

Bab 13

FAKTOR PENGHAMBAT PEMBANGUNAN

Faktor Dalam Negeri

1. Faktor Pertumbuhan penduduk

Dapat merupakan penghambat, karena :

- Bisa mengakibatkan pengangguran,
- Produktivitas rendah
- Jumlah pendapatan perkapita rendah
- Hasrat berinvestasi rendah
- Distribusi pendapatan semakin tidak merata komposisinya.
- Dapat menimbulkan urbanisasi
- Kemampuan ekspor menurun timbul keinginan utk impor

Dapat merupakan pendorong pembangunan, karena :

- Memungkinkan bertambahnya tenaga kerja
- Memperluas perkembangan pasar
- Peningkatan teknologi terutama teknologi bahan pangan

Pengaruh langsung pertumbuhan penduduk terhadap kesejahteraan dikemukakan oleh **RR NELSON & H. Leibstein**

Dibagi 2 : Jangka pendek & jangka panjang

1. Dalam jangka pendek

Pertumbuhan penduduk di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat telah mengalami perbaikan yg berarti.

2. Dalam jangka panjang

Tingkat kesejahteraan menurun di mana tingkat pendapatan = pendapatan cukup hidup.

Bab 14

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM PEMBANGUNAN :

1. Mengurangi jumlah tabungan yg diciptakan anggota masyarakat
2. Corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan & sarana sosial
3. Pemerataan pendapatan terjadi jurang antara golongan masyarakat
4. Strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan
5. Mempercepat kenaikan produksi barang makanan
6. Perkembangan ekspor impor, ekspor impor

2. Faktor penghambat pembangunan dualisme

Konsep Dualisme : Perbedaan antara bangsa kaya dan miskin, perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. 4 Unsur pokok Konsep Dualisme :

1. Dua keadaan yg berbeda : Superior dan inferior
2. Kenyataan hidup perbedaan bersifat kronis dan bukan transisional.
3. Derajat superioritas atau inferioritas terus meningkat
4. Keterkaitan antar unsur berpengaruh kecil.

Dualisme dapat dibedakan beberapa macam

1. **Dualisme Sosial**

J.H. BOEKE (Ekonom Belanda) : Suatu pertentangan sistim sosial yang diimpor dengan sistim sosial pribumi yg memiliki corak berbeda.

2. Dualisme Ekologis

CLIFFORD GEERTZ (1963) : Perbedaan dalam sistim ekologis. Menggambarkan pola-pola sosial ekonomi menyatu dalam keseimbangan internal.

3. Dualisme Teknologi

BENJAMIN HIGGINS (1956) : Suatu keadaan dimana dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi & organisasi produksi yg sangat berbeda coraknya.

4. Dualisme Finansial

HLA MYINT (1967) : dimana ada pasar modal / uang yg sangat berbeda, ada yg terorganisir (melalui bank, bursa efek) dan tidak terorganisir (tuan tanah, rentenir).

5. Dualisme Regional

Dibicarakan Para Ahli (1960) : Yaitu adanya ketidakseimbangan pembangunan di berbagai daerah dalam suatu wilayah negara.

Dualisme Regional dibedakan 2 jenis, yaitu :

1. Dualisme antara daerah perkotaan dan pedesaan
2. Dualisme antara pusat negara, pusat industri dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dalam negara tersebut.

Dengan adanya dualisme mengakibatkan ketidakmampuan shg sumber daya yang ada di NYSB tidak digunakan secara efisien : **Kurva Kemungkinan Produksi (PRODUCTION POSSIBILITIES CURVE)**

3. **Lingkaran perangkap kemiskinan (The VICIOUS CYRCLES)**

yaitu suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yg saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa shg menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yg lebih tinggi.

Ada 2 teori jenis lingkaran perangkap kemiskinan NURKSE :

1. Dari segi penawaran modal

Tingkat pendapatan masy.rendah karena produktivitas rendah.

2. Dari segi permintaan modal

Peningkatan pembentukan modal bukan hanya dibatasi oleh lingkaran perangkap kemiskinan, tetapi juga oleh **INTERNATIONAL DEMOSTRATIVE EFECT**, yaitu kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yg lebih maju.

TEORI MENURUT MEIER & BALDWIN

Lingkaran perangkap kemiskinan timbul dari hubungan saling mempengaruhi diantara keadaan masyarakat yg terbelakang & tradisional dgn kekayaan alam yg masih belum dikembangkan.

Penyebab adanya lingkaran perangkap kemiskinan :

1. Ketidakmampuan utk menyerahkan tabungan yg cukup
2. Kurangnya perangsang utk melakukan penanaman modal
3. Taraf pendidikan, pengetahuan dan keahlian masing-masing.

Faktor Luar Negeri Penghambat Pembangunan :

1. Struktur Ekspor Kolonial

Sebagian ekspor adalah barang-barang hasil pertanian, pertambangan, perikanan yg semuanya berbentuk bahan mentah. Bahan baku tersebut jenisnya sangat terbatas.

2. Proses Sebab Akibat Kumulatif

Yaitu sebab-sebab dari bertambah buruknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah, dalam suatu negara.

TEORI MENURUT MYRDAL

1. Back Wash Effect

Yaitu pembangunan di daerah maju akan menciptakan hambatan yg lebih besar kepada daerah-daerah yang terbelakang.

Penyebabnya :

- a. Corak perpindahan penduduk yg masih muda & lebih terdidik
- b. Corak aliran modal, kurangnya aliran / permintaan modal di daerah miskin. Karena modal lebih terjamin di daerah yg maju.
- c. Jaringan transportasi, daerah maju yg lebih baik

2. SPREAD EFFECT

Yaitu perkembangan daerah yg lebih maju dapat mendorong perkembangan di daerah yg miskin.

- Timbulnya barang hasil pertanian & kerajinan.

Bab 15

POTRET PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Hingga saat ini, pandangan banyak ahli ekonomi pembangunan terhadap pembangunan ekonomi masih diwarnai oleh dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Masih adanya kontroversi antara mana yang lebih dahulu untuk dilakukan dan dicapai, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan. Kontroversi tersebut muncul disebabkan karena penerapan strategi pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equity) belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Namun demikian, para ekonom sependapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses, yakni proses untuk mencapai kemajuan. Proses membutuhkan input sumber daya untuk ditransformasikan menjadi sebuah hasil. Jika input tidak memadai, tentu akan menghasilkan output yang tidak optimal. Menurut Siagian (1994), pembangunan sesungguhnya suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Secara umum, pembangunan dapat diartikan pula sebagai suatu upaya

terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Dengan definisi pembangunan tersebut, pembangunan sejatinya merupakan pencerminan kehendak dan partisipasi rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Indonesia) secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Semua itu bisa terlaksana dengan baik jika ada perencanaan, koordinasi, partisipasi publik, kelembagaan, dan sistem hukum yang baik yang menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Berbagai perspektif pembangunan tersebut merujuk kepada gelombang besar terminologi: minimalisasi peran pemerintah dan maksimalisasi peran swasta, seperti tulisan Osborne-Gaebler-Plastrik dalam *Reinventing Government* (1993) dan *Banishing Bureaucracy* (1997) hingga Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (2000). Gelombang privatisasi pembangunan tersebut muncul seiring pendekatan *good governance*, pemberdayaan, gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendekatan partisipatoris hingga masyarakat madani (Harun, 2007: 15-16)

Melihat elemen-elemen pembangunan tersebut, maka sebenarnya pembangunan mencakup jauh lebih banyak aspek. Bahwa pembangunan menuntut pendapatan per kapita yang lebih tinggi adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Namun, pembangunan yang mereduksi nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator pembangunan justru mereduksi makna pembangunan itu sendiri.

Dalam kaitan itu, konsep pembangunan yang diintroduksi Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (2000) telah membantah pandangan tersebut. Dalam studinya, Sen merumuskan kembali pengertian yang menyeluruh tentang pembangunan. Dalam dataran ini, Sen merumuskan pengertian kembali kemiskinan. Dalam pandangannya, berbagai kondisi, selain kekurangan pangan, seperti kurangnya nutrisi, buta huruf, tiadanya kebebasan sipil dan hak-hak berdemokrasi, diskriminasi, pengidapan penyakit, dan berbagai bentuk perampasan hak-hak milik (entitlement) pribadi adalah bentuk-bentuk kemiskinan yang menciptakan penderitaan. Di sini lah Sen merumuskan definisi baru pembangunan sebagai kebebasan (*development as freedom*) (Rahardjo dalam Sen, 2001: xiv-xv). Argumentasi Sen tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, kendati sebagian orang berhasil menikmati kemakmuran, namun kualitas hidup masih tetap

jauh dari jangkauan banyak orang. Kendati hampir selama dua dasawarsa pertumbuhan ekonomi yang pesat terjadi di sejumlah negara, namun banyak orang lain tidak mendapatkan keuntungan dari kemajuan tersebut. Dalam banyak situasi, kebijakan pembangunan ternyata lebih menguntungkan vested interest kaum elite, sehingga dengan demikian tidak mempromosikan investasi yang memadai dalam modal manusia dan modal alam, yang sangat esensial bagi pertumbuhan berbasis luas. Kualitas faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan menuntut perhatian fundamental apabila kemiskinan ingin dikurangi dan kualitas hidup yang lebih baik dapat dicapai oleh semua orang (Thomas, et.al., 2001: xvi).

Untuk alasan tersebut, perhatian Sen terletak pada pentingnya redistribusi aset non-fisik, seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh sebab itu, masalah paling besar dalam soal redistribusi aset adalah bagaimana meluaskan dan memperbaiki akses pendidikan bagi mayoritas penduduk yang kurang mampu. Redistribusi aset non-fisik inilah yang masih menjadi pertanyaan mendasar dalam proses pembangunan di Indonesia. Para ekonom masih berkuat soal redistribusi aset fisik (Basri, dalam Wie, 2004: xvii)

Definisi Pembangunan

Istilah pembangunan seringkali digunakan dalam hal yang sama dengan pengembangan. Sehingga istilah pembangunan dan pengembangan (development) dapat saling dipertukarkan. Namun berbagai kalangan di Indonesia cenderung menggunakan secara khusus istilah pengembangan untuk beberapa hal yang spesifik. Meski demikian, sebenarnya secara umum kedua istilah tersebut diartikan secara tidak berbeda untuk proses-proses yang selama ini secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan atau development (Rustiadi, 2006: vii-1).

Ada yang berpendapat bahwa kata “pengembangan” lebih menekankan proses meningkatkan dan memperluas. Dalam pengertian bahwa pengembangan adalah melakukan sesuatu yang tidak dari “nol”, atau tidak membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan atau diperluas (Rustiadi, 2006: vii-1).

Sumitro (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai “suatu transformasi dalam arti perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi diartikan sebagai perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi. Menurut penulis, pemahaman Sumitro ini terkait dengan pandangan Arthur Lewis (1954)

tentang pentingnya transformasi struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri dalam upaya menuju pertumbuhan (dalam aspek ini pengertian pertumbuhan asosiatif dengan pembangunan) ekonomi.

Dalam pada itu, Budiman (1995) membagi teori pembangunan ke dalam tiga kategori besar yaitu teori modernisasi, dependensi dan pasca-dependensi. Teori modernisasi menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan.

Kategori ini dipelopori orang-orang seperti (a) Harrod-Domar dengan konsep tabungan dan investasi (saving and investation), (b) Weber dengan tesis etika protestan dan semangat kapitalisme (the protestant ethic and the spirit of capitalism), (c) McClelland dengan kebutuhan berprestasi, (d) Rostow dengan lima tahap pertumbuhan ekonomi (the five stage of economics growth), (e) Inkeles dan Smith dengan konsep manusia modern, serta (f) Hoselitz dengan konsep faktor-faktor non-ekonominya.

Di lain sisi, Kartasasmita (1996) menyatakan, pembangunan adalah “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka”.

Menurut Tjokrowinoto (1997), batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan self project reality.

Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik” (Rustiadi, 2006: vii-1). Di lain sisi, UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai “suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people’s choices) (dalam Rustiadi, 2006: vii-1). Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana dilihat oleh model formasi modal manusia (human capital formation) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Menurut Todaro (2003: 28) pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin – melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional –

demikian mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Karena itu, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yaitu: pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

Pandangan Todaro merupakan pengembangan pemahaman atas pandangan Sen tentang pembangunan. Sen memaknai pembangunan sebagai kebebasan. Pembahasan pandangan pembangunan sebagai kebebasan Sen dibahas dalam sub bab di bawah ini.

Di Indonesia, istilah pembangunan sudah sejak lama menjadi terminologi sehari-hari. Terminologi yang erat kaitannya dengan pembangunan dikenal konsep Delapan Jalur Pemerataan yang merupakan penjabaran dari Trilogi

Pembangunan. Delapan jalur pemerataan yang dimaksud adalah pemerataan dalam hal: (1) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, berupa pangan, sandang dan perumahan; (2) kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pembagian pendapatan; (4) kesempatan kerja; (5) kesempatan berusaha; (6) kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) penyebaran pembangunan; dan (8) kesempatan memperoleh keadilan (Syahyuti, 2006: 166-167).

Mengacu pada berbagai definisi pembangunan di atas, maka para ekonom merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan. Dudley Seer dalam Todaro (2003) merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan sebagai berikut: a) Tingkat ketimpangan pendapatan; b) Penurunan jumlah kemiskinan; c) Penurunan tingkat pengangguran.

Ketiga ukuran keberhasilan di atas jika disimak lebih dalam adalah menuju satu sasaran akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berarti menurunnya kemiskinan (Amir, 2007: 147).

Selain itu, PBB juga telah merumuskan indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai Millenium Development Goals (MDGs),

yang terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yakni: (a) penghapusan kemiskinan; (b) pendidikan untuk semua; (c) persamaan gender; (d) perlawanan terhadap penyakit menular; (d) penurunan angka kematian anak; (e) peningkatan kesehatan ibu; (f) pelestarian lingkungan hidup; (g) kerjasama global (www.undp.or.id)

Konsep Kapabilitas Berfungsi Amartya Sen

Sen mendefinisikan “kapabilitas” sebagai “kebebasan yang dimiliki seseorang dalam arti pilihan functioning, dengan fitur-fitur personal yang dimilikinya (perubahan karakteristik menjadi functioning), dan kontrol yang dimilikinya terhadap komoditi...” (Todaro, 2003: 24).

Seperti dalam mikro ekonomi dasar, penghasilan hanya akan memiliki makna jika penghasilan tersebut dapat meningkatkan utilitas, dan utilitas itu sendiri penting karena menunjukkan kapabilitas seseorang. Dan tentu saja, kapabilitas sebagian ditentukan oleh pendapatan (Todaro, 2003: 24).

Perspektif yang ditawarkan Sen membantu memperjelas mengapa para ahli ekonomi pembangunan telah menempatkan penekanan yang begitu jelas terhadap kesehatan dan pendidikan, dan menyebut negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tetapi memiliki standar kesehatan dan pendidikan yang rendah sebagai kasus “pertumbuhan tanpa pembangunan”. Pendapatan riil memang sangat penting, tetapi

untuk mengkonversikan karakteristik komoditi menjadi fungsi yang sesuai, dalam banyak hal yang penting, jelas membutuhkan kesehatan dan pendidikan selain pendapatan. (Todaro, 2003: 25)

Menurut Wie (2004: 9), perspektif kemampuan (kapabilitas) Sen dalam batas tertentu merujuk pada pendekatan pembangunan ekonomi-sosial terpadu sebagaimana dibahas oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* dan *The Theory of Moral Sentiments*. Dalam menganalisis kemungkinan-kemungkinan produksi, Smith memang menekankan pentingnya peranan pendidikan maupun pembagian kerja, belajar dengan bekerja dan pengasahan keterampilan.

Dengan kata lain, lanjut Wie (2004: 9), yang diperhatikan adalah cara agar manusia menjadi lebih produktif sepanjang waktu sehingga memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Perspektif ini memfokuskan perhatian kepada kemampuan atau kebebasan substantif semua orang untuk menempuh kehidupan yang menjadi idaman dan meningkatkan pilihan-pilihan riil yang ada.

Konsep Kapabilitas Berfungsi mencakup tiga aspek kunci (Sen, 2000), yaitu:

a. Kecukupan, yang meliputi kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan dasar.

b. Harga diri, yang mencakup dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, jati diri sebagai negara dan masyarakat timur dan lain sebagainya.

c. Kebebasan dari sikap menghamba. Komponen kebebasan manusia melingkupi segenap komponen antara lain: kebebasan politik, keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan pemerataan kesempatan serta pembangunan anti bias perempuan.

“Kebebasan politik” memang menjadi perhatian penting Sen. Namun demikian, ia bukanlah satu-satunya kebebasan instrumental. Kebebasan instrumental lain mencakup “fasilitas ekonomi” (peluang untuk memanfaatkan berbagai sumber ekonomi dengan tujuan konsumsi, produksi dan akses kepada uang), peluang sosial (program pendidikan dan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang menjadikan seseorang memiliki kebebasan substantif agar dapat hidup lebih baik, “jaminan transparansi” (berkenaan dengan kebutuhan akan keterbukaan, termasuk hak mengungkapkan fakta guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme), dan “jaminan perlindungan” (memberikan jaringan pengaman sosial kepada orang-orang yang menanggung kemiskinan bukan karena kesalahan sendiri, misalnya akibat krisis ekonomi).

Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Di Jalur Yang Benar?

Bagian ini akan mendeskripsikan potret pembangunan Indonesia perspektif Konsep Kapabilitas Berfungsi Amartya Sen. Data-data di bawah ini menggunakan sepenuhnya menggunakan data-data yang dipublikasi oleh BPS, UNDP dan beberapa lembaga lainnya. Data-data yang tersedia hanya sampai pada tahun 2006. Berikut ini gambaran masing-masing aspek-aspek

Data BPS menunjukkan, persentase pengeluaran rumah tangga (RT) untuk makanan pada 2004 mencapai 54,59 persen menurun menjadi 51,37 persen pada 2005 dan naik lagi menjadi 53,01 persen pada 2006. Pengeluaran ini untuk makanan ini erat kaitannya dengan distribusi pendapatan masyarakat. Seiring dengan itu, 40 persen populasi berpendapatan rendah juga fluktuatif pada tahun 2004, 2005 dan 2006, yang masing-masing 20,80 persen, 18,81 persen dan 19,75 persen.

Sementara pengeluaran RT untuk non-makanan pada 2004, 2005 dan 2006 masing-masing 45,42 persen, 48,63 persen, dan 46,99. Data ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi RT di Indonesia lebih besar dibandingkan pengeluaran non-makanan. Data ini mencirikan bahwa Indonesia memang masih negara sedang berkembang, dimana

pengeluaran makanan (autonomous consumption) lebih besar dibanding dengan pengeluaran non-makanan (liburan, dll).

Oleh karena itu, tantangan memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan makanan dihadapkan pada masalah dan tantangan sebagai berikut.

1. Menjaga kegiatan ekonomi nasional yang pro rakyat agar dapat mendorong turunnya angka kemiskinan. Termasuk di dalamnya ialah menjaga kondisi ekonomi makro agar dapat mendorong kegiatan ekonomi riil yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Upaya menjaga inflasi agar tidak menurunkan daya beli masyarakat miskin, termasuk menjaga harga kebutuhan pokok utama seperti beras, menjadi tantangan serius yang harus dihadapi.
2. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi; termasuk keluarga berencana, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, mengingat secara geografis Indonesia merupakan negara yang sangat luas.
3. Melibatkan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Pengalaman menunjukkan

bahwa melibatkan serta meningkatkan kapasitas mereka sebagai penggerak dalam penanggulangan kemiskinan terbukti sangat efektif.

4. Belum berkembangnya sistem perlindungan sosial, baik yang berbentuk bantuan sosial bagi mereka yang rentan maupun sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin.

5. Adanya kesenjangan yang mencolok antar berbagai daerah (inter-regional disparity). Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antardaerah satu dengan lainnya. Ditinjau dari proporsinya, tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi tingkat kemiskinan di Jawa. Selain itu kesenjangan dapat dilihat pula dari perbedaan angka indeks pembangunan manusia yang mencolok antardaerah, termasuk antar perkotaan dan perdesaan.

Kesenjangan ini dibuktikan oleh data BPS 2004, 2005 dan 2006. 40 persen populasi ternyata hanya menikmati 20,80 persen, 18,81 persen dan 19,75 persen pendapatan. Tidak sebanding dengan 20 persen penduduk kaya yang bisa menikmati pendapatan 42,07 persen (2004), 44,78 persen (2005), dan 42,15 persen (2006). Itu sebabnya Gini Ratio Indonesia masih bertengger di angka 0,32 (2004), 0,36 (2005) dan 0,33 (2006).

Kebutuhan dasar lain yang penting menurut Sen, yang kemudian diadopsi oleh UNDP sebagai Indeks Pembangunan Manusia (HDI) adalah pendidikan dan kesehatan. Tiga indikator yang terdapat dalam HDI ini, selain pendidikan dan kesehatan adalah kekuatan daya beli (purchasing power parity/PPP) masyarakat.

Khusus untuk pendidikan dan kesehatan, Laporan MDGs 2007 menunjukkan walaupun angka partisipasi kasar tingkat SD/MI maupun SMP/MTs menunjukkan perbaikan, tetapi bila dilihat dari tingkat kelompok pengeluaran rumah tangga, maka terdapat perbedaan antara kelompok rumah tangga miskin dan non-miskin. Pada kelompok pengeluaran terbawah (kuantil 20% terbawah, Q1), APK SD/MI tahun 1995 adalah 104,88 persen dan mencapai 108,92 persen pada tahun 2006. Data tahun 1995 hingga 2006 menunjukkan indikasi bahwasanya APK SD/MI untuk kelompok pengeluaran terbawah ternyata berkembang lebih baik dari APK SD/MI untuk golongan pengeluaran teratas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada APK SMP/MTs antara tahun 1995 hingga 2006. APK SMP/MTs tahun 1995 pada kelompok pengeluaran terbawah tercatat 44,39 persen dan menjadi 70,78 persen pada tahun 2006.

Dari uraian di atas terlihat bahwa perbaikan kesejahteraan rumah tangga berpengaruh pada akses terhadap pendidikan, terutama bagi keluarga

yang mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Kesenjangan partisipasi pendidikan yang sangat mencolok antara kelompok pengeluaran terbawah (keluarga miskin) dan kelompok pengeluaran teratas (keluarga kaya) ini menunjukkan perlunya peningkatan perhatian pada kelompok keluarga miskin dalam memperoleh akses pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Balitbang Depdiknas pada 2006 yang menemukan bahwa faktor ketiadaan biaya masih dijumpai sebagai alasan penduduk usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan mereka (www.depdiknas.go.id).

Dari sisi kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) menurut proyeksi BPS (BPS-UNDP-Bappenas, 2005), pada tahun 2003 angka AKB terus membaik hingga mencapai 33,9 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun terus menurun, AKB di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN, yaitu 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina, dan 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand. Indonesia menduduki ranking ke-6 tertinggi setelah Singapura (3 per 1.000), Brunei Darussalam (8 per 1.000), Malaysia (10 per 1.000), Vietnam (18 per 1.000), dan Thailand (20 per 1.000).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia telah mengalami penurunan menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002-2003 bila dibandingkan dengan angka tahun 1994 yang mencapai 390 kematian per

100.000 kelahiran hidup. Tetapi akibat komplikasi kehamilan atau persalinan yang belum sepenuhnya dapat ditangani, masih terdapat 20.000 ibu yang meninggal setiap tahunnya. Dengan kondisi ini, pencapaian target MDGs untuk AKI akan sulit dicapai. BPS memproyeksikan bahwa pencapaian AKI baru mencapai angka 163 kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, sedangkan target MDG pada tahun 2015 tersebut adalah 102.

Di sisi yang lain Ancaman penularan HIV dan epidemi AIDS telah terlihat melalui data infeksi HIV yang terus meningkat, khususnya di kalangan kelompok perilaku beresiko. Pada tahun 2006, diperkirakan terdapat 169.000-216.000 orang yang terinfeksi HIV. Ahli epidemiologi Indonesia memproyeksikan bila tidak ada peningkatan upaya penanggulangan yang berarti, maka pada tahun 2010 jumlah kasus AIDS akan menjadi 400.000 orang dengan kematian 100.000 orang dan pada 2015 menjadi 1.000.000 orang dengan kematian 350.000 orang. Kebanyakan penularan terjadi pada sub populasi berisiko kepada isteri atau pasangannya. Pada akhir tahun 2015 diperkirakan akan terjadi penularan HIV secara kumulatif pada lebih dari 38.500 anak yang dilahirkan dari ibu yang HIV positif. Hal ini menunjukkan bahwa HIV dan AIDS telah menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia.

Aspek kebebasan yang dilihat partisipasi politik dan pemerataan kesempatan memperoleh informasi terpampang pada ilustrasi berikut ini. Akses terhadap informasi dapat dilihat dari 3 indikator di atas. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mendengar radio hanya mencapai 40,26 persen pada 2006, menurun dibandingkan 2003 yang mencapai 50,29 persen. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat yang bisa menikmati/menonton televisi mencapai 85,86 persen meningkat dibandingkan tahun 2003 yang hanya mencapai 84,94 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan pemanfaatan listrik rumah tangga yang mencapai 87,76 persen pada 2006.

Dari sisi partisipasi politik (pemilihan gubernur dan wakil gubernur), catatan Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (JPPR) menunjukkan, dari tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 hanya mencapai rentang 60-70 persen, dengan prosentase sebesar 41 persen. Sementara untuk pemilihan bupati dan walikota di 165 kabupaten/kota pada tahun yang sama mencapai 44 persen dengan tingkat partisipasi sebesar 70-80 persen.

Data ini menunjukkan, bahwa tingkat partisipasi politik masih relatif rendah, tidak sampai 50 persen. Kerendahan tingkat partisipasi politik ini disinyalir berkaitan erat dengan beberapa faktor politik, diantaranya kedewasaan berdemokrasi, sistem politik yang belum bisa mendorong masyarakat untuk

terlibat secara aktif dalam proses politik, kepastian hukum, korupsi yang dilakukan oleh politikus dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Dimensi permasalahan pembangunan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan ketiga aspek kunci dari Konsep Kapabilitas Berfungsi Amartya Sen itu mengharuskan adanya kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. Mengatasi masalah ketiga aspek tersebut akhirnya tidak hanya soal mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Ketiga aspek tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh, menyangkut multi-sektor, multi-pelaku, dan multi-waktu.

1. Mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Dua aspek penting berkaitan dengan hal ini adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong kegiatan ekonomi agar berpihak kepada penanggulangan kemiskinan. Langkah yang perlu diambil antara lain dengan menjaga tingkat inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok seperti beras. Selain itu, diperlukan upaya untuk mendorong penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang lebih luas agar mampu menjangkau masyarakat miskin. Dalam hal ini, revitalisasi pertanian serta usaha mikro, kecil dan

menengah—tempat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya—perlu terus didorong dan dikembangkan.

2. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa. Sementara itu, akses terhadap pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur kesehatan dan pemberian pelayanan gratis bagi masyarakat miskin, termasuk pelayanan rumah sakit kelas tiga.

3. Menyempurnakan serta memperluas cakupan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang rentan. Pemerintah —selain terus meningkatkan kemampuannya menjangkau bantuan sosial bagi mereka yang rentan seperti kaum cacat, lanjut usia, dan anak terlantar— juga meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial. Karena itu, kegiatan perlu terus didorong, dimonitoring dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

4. Pemberdayaan politik masyarakat, melalui media sosialisasi yang cerdas, tidak membodohi, tidak memanipulasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Karena itulah, diperlukan kepastian hukum yang mengatur

proses pelaksanaan demokrasi (pemilu), sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan dan berbagai praktik curang lainnya yang mempengaruhi hasil pemilu.

Bab 16

19 Manfaat Pembangunan Ekonomi Bagi Masyarakat dan Negara

Manfaat pembangunan ekonomi banyak yang tidak diketahui masyarakat luas. Masyarakat luas pikir, ekonomi dan pembangunannya berada di tangan pemerintah. Padahal masyarakat memegang peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ekonomi merupakan salah satu sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah.

Sayangnya ekonomi di Indonesia mengalami pasang surut, terutama kurs mata uang rupiah yang semakin anjlok di Bank Dunia. Meski begitu, sebagai warga negara Indonesia ada baiknya kita tetap menjaga dan ikut dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang namanya pembangunan ekonomi tidak akan terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang maju dan pesat akan menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat pula. Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan mengikuti dengan pertumbuhannya.

Pengertian Pembangunan Ekonomi

Banyak yang tidak tahu apa itu pembangunan ekonomi. Jika ditanya pun banyak masyarakat yang tidak tahu dan seolah-olah tidak ingin tahu. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan pendapatan total atau juga pendapatan perkapita dengan melakukan perhitungan bertambahnya penduduk dan juga diiringi dengan fundamental yang ada. Pembangunan ekonomi itu juga harus berdasarkan dengan struktur ekonomi yang ada dan pendapatannya disama ratakan oleh penduduk di suatu negara.

Manfaat Pembangunan Ekonomi



Masyarakat Indonesia

harus tahu apa saja yang menjadi manfaat dari pembangunan ekonomi. Meski pembangunan ekonomi diatur oleh pemerintah bukan berarti masyarakat Indonesia tinggal diam dan tidak mengetahui manfaat apa saja yang didapatkan dari pembangunan ekonomi. Berikut ini berbagai macam manfaat yang didapatkan dari pembangunan ekonomi :

1. Munculnya Lapangan Pekerjaan

Dengan adanya pembangunan ekonomi yang pesat dan berkembang, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan karena pembangunan ekonomi mulai berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika pembangunan ekonomi mulai digerakkan dan digalakkan, secara otomatis di berbagai sektor pembangunan terutama di bagian industri juga akan mengalami kemajuan pesat. Selain itu di dalam sektor industri itu membutuhkan banyak karyawan dalam melaksanakan industrinya. Oleh sebab itulah pembangunan ekonomi yang pesat bisa mensejahterakan masyarakat karena banyaknya tercipta lapangan pekerjaan.

2. Meningkatkan Pendapatan Nasional

Dengan adanya atau terciptanya lapangan pekerjaan yang banyak, banyaknya posisi yang membutuhkan karyawan untuk ditempati, secara tidak langsung bisa mempengaruhi terhadap meningkatnya pendapatan Indonesia. Hal itu dikarenakan semakin banyaknya industri yang bermunculan akan berpengaruh pada pajak nasional sehingga pendapatan di Indonesia pun akan naik.

3. Melancarkan Kegiatan Ekonomi

Adanya pembangunan ekonomi di Indonesia bisa digunakan untuk melancarkan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga dipercepat prosesnya dan pelaksanaannya. Alasannya adalah pembangunan ekonomi yang cepat diselesaikan di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi, sehingga jika pembangunan ekonomi tumbuh pesat maka kegiatan ekonomi di dalamnya pun bisa berjalan dengan lancar.

4. Berkembang Dengan Pesatnya Teknologi

Adanya pembangunan ekonomi yang terus berkembang dan tumbuh di dalam sektor industri dan pada sektor ekonomi yang lainnya bisa mendorong terciptanya perkembangan teknologi yang pesat dan juga disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan sebagai pengimbang dari pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia.

5. Mengurangi Jumlah Pengangguran

Karena pesatnya pembangunan ekonomi serta banyaknya sektor industri yang mulai tumbuh dan membutuhkan karyawan untuk berbagai posisi membuat pengangguran di suatu negara menjadi berkembang. Sektor industri itulah yang membuat jumlah pengangguran semakin berkurang jumlahnya.

6. Mensejahterakan Masyarakat

Karena pembangunan ekonomi yang tinggi, bisa membuat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Hal itu dikarenakan tingkat pendapatan

masyarakat pun menjadi meningkat dan berkurangnya jumlah masyarakat yang menganggur. Sehingga masyarakat pun bisa sejahtera hidupnya dan ekonominya menjadi layak.

7. Pendidikan Dapat Diperbaiki

Salah satu manfaat dari pembangunan ekonomi adalah kualitas pendidikan di Indonesia dapat diperbaiki. Alasannya adalah karena kesejahteraan masyarakat yang meningkat membuat banyak masyarakat yang bisa menyekolahkan anak mereka di jenjang pendidikan yang tinggi dan juga bagus. Berbeda halnya jika tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, untuk makan sehari-hari saja susah bagaimana jika harus menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan yang tinggi. Meski saat ini sudah ada dana BOS, sarana untuk ke sekolah itu tidak gratis seperti tas, buku, sepatu dan seragam sekolah. Oleh sebab itulah banyak orang tua yang keberatan jika menyekolahkan anaknya sedangkan untuk makan sehari-hari saja ibaratnya masih susah dan sulit tercukupi.

8. Meningkatnya Keahlian

Dengan adanya pembangunan ekonomi yang pesat dan berkembang membuat masyarakat bisa meningkatkan keahliannya, namun tidak semua keahlian bisa meningkat. Hanya keahlian tertentu saja dengan peran serta pemerintah. Pemerintah bisa mendatangkan tenaga ahli dari luar, masyarakat Indonesia bisa belajar banyak dari tenaga ahli yang didatangkan oleh pemerintah Indonesia tersebut sehingga ilmunya bisa dikuasai bersama.

9. Meningkatkan SDM Dan SDA

Dengan adanya pembangunan ekonomi yang pesat terutama di negara berkembang, akan meningkatkan Sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hal itu dikarenakan pembangunan ekonomi bisa membuat kualitas SDM dan SDA nya meningkat.

10.Meningkatnya Investor Asing Maupun Lokal Untuk Bisa Menanam Modal Di Indonesia

Dengan adanya pembangunan ekonomi yang pesat, Indonesia semakin dipercaya untuk sebagai lahan tanam modal di berbagai sektor industri yang ada. Entah itu bagi investor yang asing dan juga untuk investor lokal sendiri. Sektor industri yang pesat menunjukkan adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga banyak investor yang tidak ragu lagi untuk menamakan modalnya di Indonesia.

11.Meningkatkan Kepercayaan Rakyat Untuk Bisa Berkembang

Pembangunan ekonomi yang rendah bisa membuat rakyat menjadi pesimis terhadap kinerja pemerintah. Tidak hanya itu saja rakyat pun semakin minder untuk bisa meraih kesejahteraan hidupnya dan berkembang bersama pemerintah. Namun dengan adanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pesat bisa membuat masyarakat semakin yakin dan percaya diri untuk bisa maju dan berkembang bersama dengan pemerintah seiring dengan meningkatnya taraf kesejahteraan hidupnya bersama dengan program dan pembangunan ekonomi pemerintah.

12.Memiliki Penghasilan Yang Memadai

Karena pembangunan ekonomi yang pesat, bisa membuat negara memiliki penghasilan yang memadai. Penghasilan dari negara tersebut bisa didapatkan dari pajak yang disetorkan oleh pelaku industri yang ada di Indonesia. Seperti dengan ikonnya, pajak difungsikan untuk membangun negara. Dengan adanya sektor industri yang berkembang pesat membuat negara memiliki penghasilan yang memadai untuk melakukan berbagai macam pembangunan misalnya saja adalah pembangunan ekonomi.

13.Memberdayakan Kekayaan Negara

Pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia digunakan sebagai memberdayakan kekayaan negara. Kekayaan negara yang tidak diberdayakan akan sia-sia belaka. Banyak kekayaan negara yang tidak tersentuh oleh tangan pemerintah sehingga sumber daya itu tidak bisa menghasilkan untuk Indonesia. Jika sumberdaya dan kekayaan Indonesia bisa dimanfaatkan, nantinya kekayaan tersebut bisa berguna untuk Indonesia di masa yang akan datang.

14.Negara Menjadi Lebih Tertata

Salah satu manfaat dari pembangunan ekonomi adalah membuat negara menjadi lebih tertata pembangunannya dan pertumbuhan ekonominya.

15.Kenyamanan Terjaga

Negara yang lebih tertata di berbagai aspek bisa membuat masyarakat merasakan berbagai fasilitas umum dan fasilitas publik lebih nyaman. Berbeda halnya dengan negara yang tidak memiliki penataan yang baik, masyarakat menjadi tidak nyaman dengan berbagai macam fasilitas yang ada.

16.Memudahkan Rakyat Dalam Pembangunan Segala Bidang

Salah satu manfaat pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah bisa memudahkan rakyat untuk ikut serta dan bergabung dalam pembangunan di segala bidang. Partisipasi rakyat sangat berperan dan memegang andil dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

17.Meningkatkan Kepercayaan Negara Lain

Jika pembangunan ekonomi berkembang pesat, bisa membuat kepercayaan negara lain terhadap pemerintah Indonesia semakin meningkat. Negara lain akan melihat Indonesia atau negara berkembang lainnya memiliki kemampuan dalam menata pembangunan dan juga membangun negaranya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi jika pembangunan ekonomi itu ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat bisa membuat kepercayaan negara lain juga bisa

meningkat. Jika sudah begitu, negara berkembang seperti Indonesia akan mudah mendapatkan kerjasama diplomatik atau hubungan diplomatik dengan negara lain.

18.Melengkapi Fasilitas Negara

Salah satu bukti nyata dari pembangunan ekonomi adalah melengkapi fasilitas negara. Fasilitas yang dulunya tidak ada kini menjadi ada setelah terjadi pembangunan ekonomi. Salah satu pembangunan ekonomi yang belum terealisasi di Indonesia adalah pembangunan monorel kereta api listrik.

19.Meningkatkan Pendapatan Perkapita

Salah satu manfaat dari pembangunan ekonomi adalah bisa meningkatkan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita ini sangat penting digunakan dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian di suatu negara bisa dikatakan meningkat jika pendapatan perkapitanya dalam jangka panjang meningkat. Namun bukan berarti bahwa pendapatan perkapita harus naik terus menerus. Pendapatan perkapita bisa dipengaruhi oleh musibah atau adanya kekacauan politik sehingga menyebabkan ekonomi dan pendapatan di suatu negara mengalami kemunduran.

Baca juga : [Manfaat ekspor impor](#)

Nah dengan adanya pembangunan ekonomi ini tentu masyarakat Indonesia akan mengalami dampak yang cukup besar dalam kehidupan bernegara.

Bab 17

China Tolak Dilabeli sebagai Negara Maju, Pilih Jadi Negara Berkembang

Jakarta, CNN Indonesia -- China menolak untuk dilabeli sebagai negara maju sesuai kehendak Amerika Serikat yang menginginkannya. Negeri Tirai Bambu ini bersikeras mempertahankan status sebagai negara berkembang. Status negara berkembang China memang telah diakui oleh dunia. Bahkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA), Wang Wenbin, menyebut bahwa status negara berkembang China didukung oleh fakta-fakta konkret.

"Status China sebagai negara berkembang memiliki dasar yang kokoh yang diakui oleh WTO dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Status ini tidak boleh lepas dari China," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing, Jumat (12/5).

Wang menyatakan, fakta konkret China sebagai negara berkembang adalah seperti Produk Domestik Bruto tahun 2022 sebesar 12.741 dolar AS atau seperlima dari negara ekonomi maju dan seperenam dari AS.

Untuk urusan Produk Nasional Bruto perkapita, China berada di urutan ke-68 dan Indeks Pembangunan Manusia menduduki peringkat ke-79 dunia pada 2021, seperti negara-negara besar berkembang lainnya.

Status China sebagai negara berkembang memiliki dasar yang kokoh yang diakui oleh WTO dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Status ini tidak boleh lepas dari China," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing, Jumat

Baca artikel CNN Indonesia "China Tolak Dilabeli sebagai Negara Maju, Pilih Jadi Negara Berkembang" selengkapnya di sini:

Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>

DAFTAR PUSTAKA

Amartya Sen, 1999, *Development as Freedom*, New York: Alfred Knof

—————, 2001, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin* (terj. *On Ethics and Economics*), Penerbit Mizan, Jakarta

Amri Amir, 2007, *Perekonomian Indonesia (Dalam Perspektif Makro)*, Biografika, Bogor

Arif Budiman, 1995, *Teori-Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta

Dawan Rahardjo, *Ekonom Dari Shantiniketan*, pengantar dalam Amartya Sen, 2001, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin* (terj. *On Ethics and Economics*), Penerbit Mizan, Jakarta

David Osborne & Gaebler Ted, 1995, *Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government): Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta

Ernan Rustiadi, et., al., 2006, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, edisi Mei 2006, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor

Gerald M. Meier & James E. Rauch, 2000, *Leading Issues in Economic Development*, 7th edition, Oxford University Press

Ginandjar Kartasasmita, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES, Jakarta

M. Chatib Basri, sekapur sirih dalam Thee Kian Wie, 2004, Pembangunan, Kebebasan dan "Mukjizat Orde Baru (esai-esai), Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2003, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi kedelapan, Erlangga, Jakarta

Moeljarto Tjokrowinoto, 1997, Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Penerbit Tirai Wacana, Yogyakarta

Andi Harun, 2007, Mozaik Pembangunan Kalimantan Timur Dalam Berbagai Prisma, Cidesindo, Jakarta

Piet H. Khaidir, Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia, dalam Imam Subkhan, (ed), 2003, Siasat Gerakan Kota, Labda, Yogyakarta

Sumitro Djojohadikusumo, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Pustaka LP3ES, Jakarta

Thee Kian Wie, 2004, Pembangunan, Kebebasan dan "Mukjizat Orde Baru (esai-esai), Penerbit Buku Kompas, Jakarta

UNDP dan Bappenas, 2007, Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007, Jakarta

Syahyuti, 2006, 30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian, PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta